



LAPORAN PENELITIAN

**ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH TERHADAP
SUB SEKTOR PANGAN DI JAWA TENGAH**

OLEH :
ACHMA HENDRA SETIAWAN
HADI SASANA
BANATUL HAYATI
TRI WAHYU R
ARIEF PUJIONO

DIBIYAI OLEH DANA DIK RUTIN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SESUAI PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TANGGAL 25 AGUSTUS 1998
NOMOR : 3908/PT09.H2/N/1998

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
PEBRUARI, 1999

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Investasi Pemerintah Terhadap Sub Sektor Pangan di Jawa Tengah
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Achma Hendra Setiawan, SE
 - b. Jenis Kelamin : Laki - laki
 - c. Golongan / Pangkat : III / a
 - d. NIP : 132 163 885
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli Madya
 - e. Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP
 - f. Universitas : Diponegoro
 - g. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi
3. Anggota Peneliti : 4 (empat) orang
4. Lokasi Penelitian : Propinsi Jawa Tengah
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Jumlah Biaya : 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
7. Dibiayai Oleh : Dana DIK Rutin UNDIP Tahun 1998/1999

Semarang, Pebruari 1999

Ketua Peneliti



Achma Hendra Setiawan, SE
NIP 132 163 885



RINGKASAN

Sektor pertanian merupakan basis perekonomian di Indonesia, karena sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan kehidupannya pada sektor ini. Walaupun sumbangsih nisbi (relative contribution) sektor pertanian dalam perekonomian diukur berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam membentuk produk domestik regional bruto cenderung mengalami penurunan, hal itu bukanlah berarti nilai dan perannya semakin tidak bertambah. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, dan ingin mengetahui juga keeratan hubungan antara investasi pemerintah di sub sektor tanaman pangan terhadap perkembangan produksi tanaman pangan di Jawa Tengah. Untuk menganalisa perkembangan sub sektor tanaman pangan dengan analisa deskriptif kualitatif dan teknik analisis yang dipergunakan untuk mengetahui keeratan hubungan tersebut adalah metode korelasi.

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai produk sub sektor tanaman pangan secara absolut mengalami peningkatan meskipun mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya, kemudian berdasarkan perhitungan korelasi dapat disimpulkan bahwa variabel investasi pemerintah mempunyai hubungan yang cukup kuat dan positif terhadap perkembangan produk tanaman pangan di Jawa Tengah, karena berdasarkan perhitungan korelasi diperoleh angka koefisien korelasi (r) sebesar 0,7198. Sektor pertanian sangat berbeda dengan sektor usaha yang lainnya, karena sifat dari pertanian sangat besar sekali ketergantungannya pada alam, jadi investasi pemerintah hanya merupakan salah satu faktor saja untuk mendukung perkembangan sektor pertanian secara keseluruhan.

SUMMARY

Agriculture sector is the basic of Indonesia's economy, since the majority of Indonesian people depends on it. Although the number of relative contribution on this sector under the economy measured by its value added proportion tends to decreased, the value and role of it does not seem to show the same symptom. The value added of this sector continue to show an increasing number from time to time.

This research is conducted to understand the development of agricultural sector especially in the food crop sub sector, and also to measure the correlation intensity of government investment under the same sub sector towards the development of the food crop production in Central Java. To analyze such development it used the qualitative-descriptive analysis and the analysis technique used to measure the correlation intensity is correlation analysis.

The result shows that the value of the food crop sub sector product increase absolutely though there is a fluctuating circumstances each year, while under the measurement of correlation analysis concluded that government investment variable has a definitely strong and positive relation to the development of food crop product in central Java, with a real number showing figures on correlation analysis (r) at 0,7198. Agriculture sector is greatly differs from the other considering the fact that this sector have an immensely dependency on nature thus the government investment is only one of the factor needed to support the development of wholly agriculture sector.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmah dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini mulai dari tahap persiapan hingga penulisan laporan.

Harapan kami, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menjadi bahan masukan bagi seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Kami berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi pihak - pihak yang memerlukannya.

Semarang, Pebruari 1999

Tim Peneliti

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel : 5.1 Banyaknya Sekolah dan Murid di Dati II Jawa Tengah	20
Tabel : 5.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Kabupaten/Kotamadia di Jawa Tengah tahun 1995 – 1996.....	24
Tabel : 5.3 Pertumbuhan Sektor Pertanian di Jawa Tengah Selama Tahun 1993 – 1997 Atas Dasar Harga Konstan 1993	25
Tabel : 5.4 Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan di Jawa Tengah Selama Tahun 1993 – 1997 Atas Dasar Harga Konstan 1993	26
Tabel : 5.5 Sumbangan Sektor Pertanian Terhadap PDRB atas Dasar Harga Konstan 1993 Selama Tahun 1993 – 1997	28
Tabel : 5.6 Sumbangan Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Selama Tahun 1993 – 1997	28
Tabel : 5.7 Nilai Investasi Pemerintah Untuk Sub Sektor Tanaman Pangan di Jawa Tengah Selama Tahun 1993 – 1997	30
Tabel : 5.8 Perhitungan Koefisien Korelasi Antara Nilai Investasi Pemerintah Dengan Nilai Produk Tanaman Pangan	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah pangan akhir-akhir ini benar-benar merupakan masalah krusial. Jika tidak segera di atasi, masyarakat kita akan kelaparan, karena persediaan beras hanya cukup untuk beberapa bulan. Meskipun kondisi sudah sedemikian gawat, bayang - bayang kegelapan ini agaknya teertutup oleh maraknya manuver - manuver politik yang makin gencar dan seolah - olah melupakan masalah perut rakyat ini.

Bulog memperkirakan hasil pengadaan beras dalam negeri tahun 1998 di bawah 500.000 ton. Sebab realisasi persediaan beras hingga akhir Mei 1998 hanya 96.000 ton, yang di peroleh dari KUD sejumlah 87.000 ton serta dari non KUD sejumlah 3.000 ton dan 6.000 ton dari satgas. Pengadaan 96.000 ton ini sangat riskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kendati ada peluang untuk mengamankan dan meningkatkan produksi padi melalui musim pane saat ini, tetapi peluang itu hanya 35 % dari total produksi nasional (Suara Merdeka. 10 Juni 1998).

Kondisi memburuknya penyediaan pangan itu di kuatkan oleh hasil observasi lapangan oleh Bulog bersama BPS, Departemen Pertanian dan Kantor Menko Ekuin di wilayah Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan. Hasil observasi menunjukkan terjadi penurunan produksi secara signifikan, sehingga di khawatirkan akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, saat ini pemerintah telah menyiapkan alternatif pengadaan beras melalui impor baik dalam bentuk bantuan, pinjaman maupun pembelian langsung ke beberapa negara.

Sejak kegagalan mempertahankan swasembada beras tahun 1984, kita menyadari pola makan kita menjadi pemicu percepatan kebutuhan beras sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kesadaran untuk mempertahankan swasembada beras itu harus di upayakan, pola makan nasi di ganti dengan diversifikasi menu makan lain, sehingga tidak selalu harus makan nasi. Mengandalkan beras sebagai makanan utama menuntut tersedianya komoditas itu

dalam jumlah yang cukup setiap tahunnya. Disisi lain lahan pertanian makin terdesak oleh kegiatan industri, sehingga produktifitasnya sulit meningkat. Sedangkan mengandalkan impor akan berdampak luas terhadap perekonomian secara nasional.

Pemerintah telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan beras, antara lain melalui Keppres No. 2/1995 tentang pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan di Kalimantan Tengah. Terobosan teknologi pertanian guna memperoleh efisiensi produksi, antara lain dengan menerapkan sistem tanam tanpa olah tanah (TOT), mengingat masalah utama dalam budidaya padi sawah selama ini berkuat pada ketersediaan air dan tenaga kerja. Berbagai kebijakan kredit untuk membantu permodalan petani agar tidak terjerat pada lintah darat / sistem ijon yang sangat merugikan petani. Penyediaan sarana produksi secara lokal untuk meningkatkan gairah pembangunan pertanian. Investasi pemerintah dalam sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya di sub sektor pangan sejak Pelita pertama dan sebagainya.

Pembangunan daerah sebagai bagian tak terpisahkan dan bermakna mendukung serta melengkapi pembangunan nasional sudah barang tentu harus berjalan serasi serta selaras dengan pembangunan nasional. Pembangunan di Dati I Propinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian integral dari pada pembangunan nasional berusaha mendorong laju pertumbuhan ekonominya dengan meningkatkan pertumbuhan dalam produksi regionalnya. Peranan masing - masing sektor dalam produksi regional tahun 1995 menunjukkan : pertanian 22,81 %, industri 31,88 %, perdagangan 20,75 %, jasa 9,90 % dan sektor - sektor lainnya sebesar 16,66 % (Jawa Tengah Dalam Angka, 1996).

Dengan pola sumbangan masing - masing sektor seperti tersebut diatas sektor pertanian dalam PDRB masih memberikan andil yang cukup dominan. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang cukup besar pada peningkatan pembangunan pertanian di Jawa Tengah, mengingat wilayah Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan di atas secara umum dapat di simpulkan bahwa sampai saat ini masih rentan sekali pengadaan pangan khususnya beras untuk mencukupi kebutuhan makan rakyat secara keseluruhan.

Secara khusus identifikasi masalah yang akan di teliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana pengadaan sub sektor pangan melalui sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan makan rakyat di Jawa Tengah.
- Mengetahui keeratan hubungan antara investasi pemerintah pada sub sektor pertanian tanaman pangan dengan perkembangan nilai produk pertanian tanaman pangan di Jawa Tengah.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup teritorial dari studi ini adalah wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Daerah Tingkat II dengan menggunakan data - data selama kurun waktu dari tahun 1993 - 1997. Sedang lingkup substantif dari studi ini adalah :

- Menganalisis dan mengadakan evaluasi perkembangan sektor pertanian pada umumnya dan khususnya sub sektor pangan.
- Menganalisis investasi pemerintah di sub sektor pertanian tanaman pangan dan menemukan keterkaitan antara investasi pemerintah di sub sektor pertanian tanaman pangan dengan nilai produk tanaman pangan di Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Budiono (1985) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi penekanannya pada tiga aspek, yaitu : proses, output perkapita dan jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Sehingga ada aspek dinamis dalam perekonomian yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan.

Kemudian pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, disini ada dua aspek yang perlu di perhatikan yaitu penduduk dan output total. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Aspek ketiga dari pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila dalam jangka waktu yang lama (sepuluh, dua puluh atau lima puluh tahun bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output perkapita. Menurut Sadono Sukirno (1985), pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi harus di perbandingkan pendapatan nasional dari berbagai tahun.

Suatu perekonomian di katakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi dari pada yang di capai pada masa sebelumnya. Dengan perkataan lain, perkembangan baru tercipta apabila jumlah phisik barang - barang dan jasa - jasa yang di hasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun - tahun berikutnya.

Untuk mengetahui suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, perlulah di tentukan perubahan yang sebenarnya berlaku dalam kegiatan - kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun, dalam mencapai tujuan ini pengaruh perubahan harga - harga terhadap nilai pendapatan pada berbagai tahun harus di hapuskan. Hal ini di lakukan dengan menghitung pendapatan menurut harga konstan.

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda, perlu di uraikan secara singkat pengertian dasar PDRB dan cara penyajiannya. Pengertian PDRB dapat di interpretasikan menurut tiga pendekatan (BPS : Pendapatan Regional, 1996) :

1. Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah dari nilai produk barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.
2. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang di terima oleh faktor - faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu biasanya satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang di maksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum di potong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian produk domestik regional bruto, kecuali faktor pendapatan di atas, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor di sebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.
3. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir seperti : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, (2) konsumsi pemerintah,

(3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok, (5) ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.

Dalam penelitian ini di gunakan pengertian Produk Domestik Regional Bruto melalui pendekatan produksi.

2.3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah hasil bagi antara pendapatan regional di wilayah tersebut dengan jumlah seluruh penduduk di wilayah tersebut. Dalam hal ini jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pendapatan regional di sini adalah seluruh jumlah produksi dari seluruh kegiatan ekonomi yang di lakukan di wilayah tertentu baik yang berupa produk phisik maupun produk yang berupa jasa di tambah dengan pendapatan neto. Dengan kata lain bahwa pendapatan regional adalah Produk domestik neto atas dasar biaya faktor plus pendapatan yang neto. Hal tersebut terjadi karena ada pendapatan yang keluar wilayah / di terima masyarakat di luar wilayah bersifat mengurangi dan pendapatan yang masuk dari luar wilayah bersifat menambah.

2.4. Perubahan Struktur Produksi

Menyertai proses pembangunan ekonomi, akan terlihat antara lain terjadinya gejala-gejala sebagai berikut :

- a. Perkembangan atau pertumbuhan produksi tiap jenis barang dan jasa yang sudah ada tidak sama cepatnya.
- b. Perkembangan produksi jenis barang dan jasa yang tidak atau diproduksi sebelumnya.

Adanya gejala-gejala diatas menyebabkan laju pertumbuhan nilai tambah bruto tiap sektor atau sub sektor dalam proses pembangunan tidak sama cepatnya. Hal tersebut menyebabkan nilai tambah gruto tiap sektor atau tiap sub sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto atau struktur produksi dalam perekonomian suatu daerah.

Dilihat dari segi permintaannya, terjadinya kedua gejala yang menyertai proses pembangunan seperti diuraikan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a). Adanya perbedaan dalam elastisitas pendapatan untuk tiap jenis barang dan jasa, sehingga mengakibatkan jenis barang dan jasa yang sudah ada tidak sama cepatnya. Hal ini adalah seperti yang ditunjukkan oleh hukum Engel (Sadono Sukirno, 1982) bahwa makin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian. Akan tetapi sebaliknya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli produksi barang-barang industri dan jasa makin bertambah besar.
- b). Adanya peningkatan pendapatan per kapita menyebabkan semakin beraneka ragamnya jenis barang dan jasa yang diminta masyarakat (Sadono Sukirno, 1982). Dengan perkataan lain dalam pendapatan per kapita yang meningkat menyebabkan terjadinya permintaan terhadap jenis barang dan jasa yang tidak atau belum diminta sebelumnya.

2.5. Cara-cara Yang Dipergunakan Untuk Menunjukan Corak Perubahan Struktur Ekonomi

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan corak perubahan struktur ekonomi dalam suatu proses pembangunan, yaitu :

- a. Kuznets (1966) menyatakan bahwa corak perubahan struktur ekonomi dapat ditunjukkan dengan melihat perubahan prosentase penduduk yang bekerja di berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi dan perubahan sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi terhadap produksi nasional dalam proses produksi.

b. H.B. Chenery dan M.Syrquin (1975) menunjukkan ada 10 Corak jenis perubahan dalam struktur perekonomian yang berlaku dalam proses pembangunan negara-negara berkembang. Perubahan tersebut dibedakan menjadi 3 golongan :

1. Perubahan dalam struktur ekonomi yang di pandang sebagai perubahan dalam proses akumulasi. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk sebagai proses akumulasi adalah pembentukan modal atau investasi pengumpulan pendapatan daerah dan pemerintah, dan kegiatan menyediakan pendidikan bagi masyarakat.
2. Perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang di pandang sebagai perubahan dalam proses alokasi sumber-sumber daya resources. Yang tergolong sebagai alokasi sumber daya adalah : struktur permintaan domestik, struktur produksi (produksi sektor primer, sektor industri, perusahaan utilities dan sektor jasa) dan sektor perdagangan.
3. Perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang di pandang sebagai perubahan dalam proses demografis dan distributif. Dalam golongan ini meliputi alokasi tenaga kerja dalam berbagai sektor, urbanisasi, tingkat kelahiran dan kematian serta distribusi pendapatan.

Karena terbatasnya dana dan waktu dalam penelitian ini hanya akan ditinjau perubahan struktur ekonomi dilihat dari perubahan struktur produksinya yang dalam hal ini adalah struktur Produksi Domestik Regional Bruto. Secara lebih khusus lagi akan di analisis pada satu sektor saja yaitu sektor pertanian.

2.6. Struktur Ekonomi

Mengenai struktur ekonomi dan rangka produksi pada suatu negara atau (daerah) kita berpangkal pada produksi nasional (daerah). Dengan produk nasional di maksud adalah produksi barang-barang dan jasa-jasa yang terlaksana dalam masyarakat selama satu masa waktu tertentu, biasanya satu tahun. (Soemitro Joyohadikusumo, 1965).

Ada beberapa cara pengelompokan lapangan usaha ke dalam sektor-sektor, yang dikenal dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan ekonomi pembangunan, antara lain :

- a. Simon Kuznets (1966) membagi lapangan usaha ke dalam 3 kelompok sektor yaitu :
 - Sektor pertanian
 - Sektor industri, terdiri dari : pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, pengangkutan dan komunikasi.
 - Sektor jasa, terdiri dari : perdagangan, rumah makan dan hotel, perbankan, asuransi dan lembaga keuangan lainnya, perdagangan benda tak bergerak, sewa rumah, administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jasa.
- b. H.B. Chenery dan M. Syerquin (1975) mengelompokkan lapangan usaha ke dalam 4 kelompok sektor yaitu :
 - Sektor primer : pertanian, pertambangan dan penggalian
 - Sektor industri : industri pengolahan dan bangunan
 - Sektor utility : listrik, gas dan air minum, pengangkutan dan komunikasi.
 - Sektor jasa : sisanya
- c. V.V. Bhanoji Rao (1980) mengelompokkan lapangan usaha ke dalam 3 sektor. :
 - Sektor primer : pertanian, pertambangan dan penggalian
 - Sektor sekunder : industri pengolahan dan bangunan
 - Sektor tersier : sisanya.

d. Biro Pusat Statistik mengelompokkan lapangan usaha ke dalam 11 sektor, yaitu :

- Pertanian
- Pertambangna dan penggalian
- Industri
- Listrik, gas dan air minum
- Bangunan
- Perdagangan
- Pengangkutan dan komunikasi
- Bank dan lembaga keuangan
- Sewa rumah
- Pemerintahan dan pertahanan
- Jasa-jasa

Dalam penulisan penelitian ini dipergunakan cara menurut Biro Pusat Statistik. Karena pembagian tersebut sudah sesuai dengan anjuran perserikatan bangsa-bangsa, yang juga dianut oleh banyak negara di dunia (Ace Partadirdja, 1977).

2.7. Pengertian Penanaman Modal (Investasi)

Pengetian penanaman modal (investasi) banyak sekali di kemukakan oleh para ahli ekonomi. Tetapi umumnya, pengertian investasi yang banyak dipakai adalah pengertian investasi menurut J.M. Keynes (1958 : 60) :

Investasi adalah suatu penambahan terhadap persediaan modal riil, seperti pembangunan pabrik, fasilitas-fasilitas transportasi, bangunan-bangunan perkantoran baru dan penambahan persediaan. Penggunaan istilah ini harus secara hati - hati di bedakan dengan investasi finansial / keuangan murni seperti pembelian saham dan obligasi di pasar surat berharga.

Jadi menurut Keynes penanaman modal / investasi adalah suatu penambahan modal riil dalam suatu perekonomian. Pengertian ini harus di bedakan dengan pengertian investasi seperti banyak orang pergunakan yaitu pembelian saham, obligasi / surat berharga lainnya, oleh Keynes hal ini di sebut investasi finansial murni.

Pendapat ahli ekonomi yang lain yaitu Paul A. Samuelson (Paul A. Samuelson, 1975 : 248) :

Bagi ahli ekonomi, investasi selalu berarti pembentukan modal riil, produksi dari barang - barang tambahan dalam persediaan, atau produksi unit - unit produksi baru , rumah - rumah baru dan alat - alat baru.

Dari berbagai pendapat ahli ekonomi tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa definisi investasi adalah suatu penambahan terhadap modal riil dalam suatu perekonomian. Sedangkan yang di maksud dengan modal riil di sini ialah semua bentuk kekayaan yang dapat di gunakan langsung dalam proses produksi untuk menambah output. Lebih khusus dapat di katakan bahwa modal riil terdiri dari barang - barang yang di buat untuk penggunaan produksi masa yang akan datang, contohnya : pabrik-pabrik, bangunan-bangunan, mesin-mesin, alat-alat dan barang - barang lain sejenis (Irawan dan Suparmoko, 1979 : 96).

2.8. Jenis - jenis Penanaman Modal (Investasi)

Banyak jenis - jenis investasi yang terdapat dalam buku teks ekonomi makro dan ekonomi moneter yang di tulis oleh para ahli ekonomi. Dalam penelitian ini hanya di tinjau berdasarkan pelaksanaannya. Berdasarkan pelaksanaannya, investasi dapat di bagi menjadi tiga yaitu :

- Investasi pemerintah, yaitu investasi yang di lakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan uang tetapi keuntungan sosial misalnya : kenaikan pendapatan masyarakat, tercukupinya segala kebutuhan pokokmasyarakat seperti : pangan, sandang, papan, keamanan, hiburan dan lain - lainnya. Investasi oleh pemerintah ini

sering di sebut juga investasi otonom atau “ social overhead capital “ dan “ economic overhead capital “ (Sobri, 1982 : 145).

- Investasi swasta, yaitu investasi yang di lakukan oleh swasta dan bertujuan mendapatkan keuntungan finansial. Investasi oleh swasta ini biasanya di dorong oleh kenaikan pendapatan masyarakat. (UU No. 1 / 1967).
- Investasi gabungan antara pemerintah dengan swasta, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta.

Jenis investasi berdasarkan pelaksanaannya, biasa juga di bagi menjadi dua, yaitu :

- Investasi asing, ialah investasi yang di lakukan oleh pihak swasta asing.
- Investasi domestik atau investasi yang di lakukan oleh swasta di dalam negeri.

Di dalam penelitian ini hanya di tinjau investasi yang di lakukan oleh pemerintah saja, dalam hal ini yaitu pemerintah pusat dan pemerintah Dati I Jawa Tengah.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui perkembangan sektor pertanian khususnya sub sektor pangan di Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang merupakan daerah penyangga pangan nasional.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh dan keterkaitan investasi pemerintah dalam sub sektor pertanian tanaman pangan dengan perkembangan pruduk pertanian tanaman pangan di Jawa Tengah.

3.2. Manfaat Penelitian

Dari guna laksana penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan untuk instansi terkait. Disamping itu penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan kepada pengembangan ilmu (sains).

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Jenis dan Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini di gunakan data primer dan data sekunder. Data primer di kumpulkan melalui wawancara dengan para key person yang terkait, dalam hal ini Departemen Pertanian, Kantor Bappeda Tingkat I Jawa Tengah, Biro Pusat Statistik serta instansi terkait. Data sekunder yang di kumpulkan bersumber dari Departemen Pertanian, Biro Pusat Statistik, Bappeda serta dari instansi terkaitlainnya, yaitu :

- Produk Domestik regional Bruto Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah mulai tahun 1993 - 1997
- Data investasi pemerintah dalam sektor pertanian dan sub sektor tanaman pangan di Propinsi Jawa Tengah
- Laporan Tinjauan Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah

4.2. Lokasi Penelitian

Ruang lingkup teritorial dari studi ini adalah wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Daerah Tingkat II dengan menggunakan data - data selama kurun waktu dari tahun 1993 - 1997.

4.3. Metode Analisis

Guna menguji permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini di gunakan metode analisis kualitatif dan Statistik deskriptif. Analisis ini untuk mengetahui perkembangan nilai produk pertanian, dan untuk menguji keeratan hubungan antara investasi pemerintah di sektor pertanian khususnya sub sektor pangan dengan perkembangan pengadaan pangan di Daerah Tingkat I Jawa Tengah menggunakan

metode analisis korelasi (Anto Dayan, 1984 : 350). Formula untuk menghitung tingkat korelasi tersebut adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\sum X_i Y_i}{\sqrt{\sum X_i^2} \sqrt{\sum Y_i^2}}$$

$$X_i = x - \bar{x} \quad ; \quad \bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$Y_i = y - \bar{y} \quad ; \quad \bar{y} = \frac{\sum y}{n}$$

Dimana : Y_i = Nilai produk tanaman pangan pada tahun ke - i

X_i = Nilai investasi pemerintah pada tahun ke - i

Y = Nilai produk tanaman pangan

X = Nilai investasi pemerintah

\bar{Y} = Rata - rata nilai produk tanaman pangan

\bar{X} = Rata - rata nilai investasi pemerintah

n = Periode waktu

Pengujian hipotesis koefisien korelasi adalah sebagai berikut :

H1 ; $r > 0$ artinya investasi pemerintah mempunyai hubungan positif terhadap perkembangan produk tanaman pangan

H0 ; $r = 0$ artinya investasi pemerintah di sub sektor tanaman pangan tidak berpengaruh terhadap perkembangan produk tanaman pangan

$$T - \text{hitung} = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}} \quad ; \alpha = 10 \%$$

Ketentuan :

- Jika nilai $t - \text{hitung}$ kurang dari $t - \text{tabel}$ maka H0 diterima, artinya nilai investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap perkembangan nilai produk sub sektor tanaman pangan. Demikian pula jika $t - \text{tabel}$ sama dengan $t - \text{hitung}$.
- Jika nilai $t - \text{hitung}$ lebih besar dari $t - \text{tabel}$ H1 diterima, artinya investasi pemerintah mempunyai dampak yang kuat terhadap perkembangan produk dari sub sektor tanaman pangan

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

5.1.1. Kondisi Geografis

Wilayah Propinsi Jawa Tengah sebagai daerah penelitian terbagi dalam 35 Daerah Tingkat II (6 Kotamadia dan 29 Kabupaten) terletak antara $108^{\circ} 30'$ Bujur Timur sampai $111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 40'$ Lintang Selatan sampai $8^{\circ} 30'$ Lintang Selatan (termasuk Karimunjawa). Letaknya diapit oleh Propinsi Jawa Barat di sebelah Barat, di sebelah timur Propinsi Jawa Timur dan di sebelah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan 226 km (tidak termasuk Karimunjawa).

Luas daerah penelitian tahun 1996 adalah 3.254.412 ha, terdiri dari tanah sawah 1.008.318 ha dan tanah kering seluas 2.246.094 ha. Dibanding tahun 1992 luas wilayah propinsi Jawa Tengah berkurang seluas 408 ha, karena terdapat proyek perluasan Sungai Citandui di Kecamatan Kedung Jero Kabupaten Cilacap, yang sekarang masuk ke wilayah Propinsi Jawa Barat.

Keadaan tanah di daerah penelitian berdasarkan Peta Tanah Direktorat Bina Program Kehutanan terdapat beberapa jenis tanah. Jenis tanah tersebut adalah:

- Latosol (31,26% dari luas Propinsi Jawa Tengah) agak peka terhadap erosi dan sangat baik bagi pertanian. Jenis tanah ini tersebar di daerah gelombang sampai gunung di daerah Brebes/Banyumas, kedu sampai Gunung Lawu.
- Aluvial (18,00%) tidak peka terhadap erosi dan baik sebagai pertanian. Jenis tanah ini tersebar di dataran rendah dan cekung sepanjang Patai Utara, Selatan, dan Timur Laut.
- Grumusol (15,24%) peka terhadap erosi dan sebagian besar sebagai tanah pertanian/ perkebunan. Tersebar di daerah datar dan bergelombang di bagian timur laut dan tenggara.

- Regosol (11,78%) sangat peka erosi dan sebagian sebagai tanah pertanian/perkebunan. Tersebar di daerah bukit sampai gunung dan bergelombang di bagian barat laut, tenggara sampai timur.
- Mediteran (7,48%) kurang peka terhadap erosi, sebagian besar sebagai tanah kebun maupun tegalan. Tersebar di daerah bukit sampai gunung di daerah Banyumas - Purworejo, Bengawan Solo di bagian timur.
- Litosol (5,92%) merupakan tanah pertanian yang kurang baik/padang rumput. Jenis tanah ini tersebar di daerah berombak sampai berbukit di bagian barat, tengah dan timur.
- Andosol (4,44%) peka terhadap erosi dan tersebar di daerah pegunungan di bagian tengah.
- Hidromorf (3,43%) tidak peka terhadap erosi dan tersebar di daerah Kudus sampai Ke Rembang/Randublatung.
- Podsolik (2,41%) tersebar di daerah bukit sampai gunung di daerah Banyumas-Purworejo. Sebagai tanah pertanian, perkebunan hutan dan ilalang.
- Organosol (0,04 persen) sifatnya sangat peka terhadap erosi dan tersebar di daerah datar dan cekung di Gunung Prah.

Wilayah daerah penelitian memiliki relief yang beraneka ragam, ada daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang Pulau Jawa di bagian tengah, ada daerah dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah, ada pula daerah pantai yaitu pantai utara dan selatan.

Dilihat dari keadaan topografi, dapat disimpulkan bahwa lahan seluas 69 persen dapat dibudidayakan secara tidak terbatas sesuai dengan ketinggiannya. Sedangkan 21,2 persen luas lahan hanya dapat dibudidayakan dengan cara tertentu atau diterapkan perlakuan khusus. Untuk lapisan tanah yang tebal dapat digunakan sistem terasering dan untuk lapisan tanah tipis perlu segera dihutankan. Menurut Direktorat Bina Program Kehutana tipe iklim, terbagi atas:

- Tipe iklim A, mempunyai sifat 1 bulan kering dan minimum 7 bulan basah dan penyebarannya di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat, sekitar Pulau Nusakambangan dan sekitar Pegunungan Slamet.
- Tipe iklim B, mempunyai sifat 1-2 bulan kering dan 3-10 bulan basah dan penyebarannya sekitar daerah Cilacap sampai daerah Ungaran.
- Tipe iklim C, mempunyai sifat 1-4 bulan kering dan 9 bulan basah dan penyebarannya hampir seluruh wilayah Jawa Tengah.
- Tipe iklim D, mempunyai sifat 1-6 bulan kering dan 1-7 bulan basah dan penyebarannya di daerah pantai utara bagian barat dan timur serta daerah Bengawan Solo hulu.

5.1.2. Sosial Budaya

Pendidikan memegang peranan penting bagi suatu negara, sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, akan semakin mudah menerima serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi, yang pada gilirannya nanti merupakan sumber daya yang sangat berperan dalam meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Menurut Susenas tahun 1996, penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak/belum tamat SD sebesar 29,02 persen turun menjadi 26,50 persen pada tahun 1997. Persentase penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan SD, SLTP, SLTA dan SMK mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 35,27 persen, 9,35 persen, 1,40 persen, dan 4,77 persen kemudian pada tahun 1997 meningkat menjadi 36,52 persen, 12,48 persen, 7,15 persen dan 3,06 persen.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat hidup sejahtera. Berdasarkan hasil Susenas persentase penduduk Jawa Tengah pada tahun 1996 yang dapat membaca dan menulis huruf latin adalah 82,66 persen, membaca dan menulis huruf lainnya 1,33

persen dan penduduk yang masih buta huruf sebesar 1,01 persen. Untuk tahun 1997 penduduk yang bisa membaca dan menulis huruf latin mengalami peningkatan menjadi sebesar 86,01 persen, bisa membaca dan menulis huruf lainnya meningkat menjadi sebesar 1,43 persen dan penduduk yang masih buta huruf sebesar 12,56 persen. Adapun perkembangan banyaknya sekolah dan siswa di daerah penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Banyaknya Sekolah dan Murid di Dati II Jawa Tengah Tahun 1997

Dati II	SD / Sederajat	Murid	SLTP / Sederajat	Murid	SMU / Sederajat	Murid
1. Kab. Cilacap	1.223	220.500	156	69.882	57	20.267
2. Banyumas	1.031	173.933	129	81.175	37	21.047
3. Purbalingga	593	90.862	56	30.530	24	9.690
4. Banjarnegara	758	99.120	56	26.098	20	6.744
5. Kebumen	900	172.715	102	61.533	33	12.979
6. Purworejo	633	93.080	95	62.508	32	12.049
7. Wonosobo	551	85.760	55	22.711	38	7.069
8. Magelang	749	101.499	118	36.549	46	11.560
9. Boyolali	659	95.184	93	41.744	49	14.129
10. Klaten	932	129.940	132	79.952	54	22.658
11. Sukoharjo	505	77.187	72	43.500	31	13.494
12. Wonogiri	872	107.616	120	61.545	32	9.836
13. Karanganyar	512	86.668	78	48.966	24	10.111
14. Sragen	604	104.292	85	54.830	36	15.774
15. Grobogan	886	176.672	87	46.440	39	14.829
16. Blora	688	103.770	71	37.337	33	12.237
17. Rembang	451	67.288	43	21.547	23	7.907
18. Pati	794	118.493	76	42.476	27	14.137
19. Kudus	509	73.046	44	26.319	22	14.630
20. Jepara	632	100.856	60	22.686	26	9.578
21. Demak	587	124.878	48	23.876	27	7.696
22. Semarang	587	90.222	83	53.304	34	9.358
23. Temanggung	469	69.494	64	25.862	18	4.598
24. Kendal	597	113.147	76	39.723	30	11.489
25. Batang	495	80.630	51	20.297	14	4.756
26. Pekalongan	564	98.063	50	25.565	19	7.982
27. Pemalang	799	180.565	78	34.878	26	13.182
28. Tegal	779	181.702	65	46.117	28	13.194
29. Brebes	922	210.785	86	47.484	41	18.335
30. Kod. Magelang	86	13.899	24	12.335	18	8.508
31. Surakarta	332	60.663	88	51.196	56	32.650
32. Salatiga	105	16.283	24	12.751	9	5.359
33. Semarang	703	140.929	167	97.375	90	42.525
34. Pekalongan	155	26.396	25	14.441	13	5.078
35. Tegal	159	29.565	32	18.284	26	9.702
Total 1997	21.821	3.715.702	2.689	1.431.816	1.132	455.137

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 1998

5.1.3. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1997, yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993 lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,03 persen (1996=7,30%). Hal tersebut cukup beralasan mengingat perjalanan perekonomian selama tahun 1997 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaruh musim kemarau yang berkepanjangan hingga akhir tahun 1997 yang berpengaruh terhadap produksi pertanian, disertai dengan mulai terasanya dampak krisis ekonomi dan moneter terhadap sektor konstruksi, industri dan perdagangan.

Pertumbuhan riil secara sektoral tahun 1997 terlihat bervariasi, namun secara umum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai sektor listrik, gas dan air minum sebesar 13,47 persen, meskipun peranannya terhadap PDRB di bawah satu persen. Pertumbuhan riil terendah dicapai oleh sektor pertanian yang mengalami minus sebesar 3,20 persen.

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi di Jawa Tengah yaitu sebesar 31,79 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,87 persen. Sementara sektor keuangan yang diharapkan sebagai penunjang roda perekonomian mampu tumbuh 7,99 persen dengan peranannya 5,29 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang masih merupakan sektor dominan memberikan sumbangan berarti bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 22,29 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 6,40 persen.

Peranan sektor pertanian masih cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena mampu memberi andil 19,05 persen, meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pergeseran struktur ekonomi di Propinsi Jawa Tengah yang cukup besar ini belum diikuti oleh semua Daerah Tingkat II, sebagian besar Dati II di Jawa Tengah masih mengandalkan perekonomiannya pada sektor pertanian, hal ini karena selain sebagian besar wilayah di Dati II merupakan daerah agraris sehingga sektor pertanian sebagai mata pencaharian pokok dan merupakan andalan penopang pertumbuhan ekonominya juga belum majunya sektor industri. Sektor industri

pengolahan belum mampu menjadi sektor penggerak ekonomi di Daerah Tingkat II dan masih mengalami banyak kendala seperti kurangnya permodalan, kualitas sumber daya manusia maupun jiwa wirausaha yang masih rendah.

5.1.4. PDRB Menurut Kabupaten/Kotamadia

Gambaran mengenai peranan sektor-sektor atau posisi masing-masing wilayah tersaji dalam PDRB menurut Kabupaten/Kotamadia yang dihitung oleh masing-masing daerah. Hal tersebut, mengakibatkan perbedaan angka PDRB propinsi dengan total PDRB Tingkat II, dan sampai sekarang masih dilakukan penyelarasan.

Kotamadia Semarang sebagai pusat perekonomian Jawa Tengah mempunyai sumbangan terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5.28 triliun rupiah pada tahun 1996. Sementara itu untuk daerah lain yang andilnya cukup besar adalah Kabupaten Cilacap (3.59 triliun rupiah) serta Kabupaten Kudus (3.42 triliun rupiah).

Berdasarkan sumbangan terhadap PDRB 1996, sektor industri merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Dati II Cilacap, Kabupaten Dati II Karanganyar, Kabupaten Dati II Kudus, Kabupaten Dati II Semarang, Kabupaten Dati II Kendal, dan Kabupaten Dati II Pekalongan dengan distribusi prosentase 46,08 persen, 37,08 persen, 61,97 persen, 31,92 persen, 40,27 persen dan 28,61 persen

5.1.5. PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kotamadia

Besarnya PDRB per kapita bervariasi antara kabupaten/kotamadia, karena selain dipengaruhi potensi dari wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk wilayah bersangkutan. Namun secara umum wilayah kotamadia mempunyai PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten.

Beberapa kabupaten/kotamadia dengan PDRB per kapita cukup besar pada tahun 1996, berturut-turut adalah Kabupaten Kudus (5.29 juta rupiah), Kota Semarang (4.24 juta rupiah), serta Kabupaten Cilacap (3.40 juta rupiah).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1996, yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993 lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,30 persen. Hal tersebut cukup beralasan mengingat pembangunan di daerah dan gairah usaha di berbagai sektor masih memberikan peluang yang memungkinkan. Pertumbuhan riil secara sektoral tahun 1996 terlihat bervariasi. Pertumbuhan tertinggi dicapai sektor listrik, gas dan air minum sebesar 14,03 persen, meskipun peranannya terhadap PDRB di bawah satu persen. Pertumbuhan riil terendah dicapai oleh sektor pertanian sebesar 3,37 persen.

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi di Jawa Tengah yaitu sebesar 31,84 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,71 persen. Sementara sektor keuangan yang diharapkan sebagai penunjang roda perekonomian mampu tumbuh 7,11 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang masih merupakan sektor dominan memberikan sumbangan berarti bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 21,58 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 8,35 persen.

Peranan sektor pertanian masih cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena mampu memberi andil 20,27 persen, meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pergeseran struktur ekonomi di Propinsi Jawa Tengah yang cukup besar ini belum diikuti oleh semua Daerah Tingkat II, sebagian besar Dati II di Jawa Tengah masih mengandalkan perekonomiannya pada sektor pertanian, hal ini karena selain sebagian besar wilayah di Dati II merupakan daerah agraris sehingga sektor pertanian sebagai mata pencaharian pokok dan merupakan andalan penopang pertumbuhan ekonominya juga belum majunya sektor industri. Sektor industri pengolahan belum mampu menjadi sektor penggerak ekonomi di Daerah Tingkat II dan masih mengalami banyak kendala seperti kurangnya permodalan, kualitas sumber daya manusia maupun jiwa wirausaha yang masih rendah.

Tabel 5.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993
Menurut Kabupaten/Kotamadia
Di Jawa Tengah Tahun 1995 – 1996

Dati II	1995	1996
1. Kab. Cilacap	3.183.734,23	3.591.159,14
2. Banyumas	973.579,97	1.031.830,88
3. Purbalingga	557.214,77	599.876,74
4. Banjarnegara	809.290,70	868.530,68
5. Kebumen	911.487,62	968.229,04
6. Purworejo	633.346,95	680.702,10
7. Wonosobo	517.874,59	551.275,58
8. Magelang	958.226,89	1.020.949,42
9. Boyolali	888.632,09	947.804,65
10. Klaten	1.177.447,97	1.261.163,90
11. Sukoharjo	990.382,98	1.079.016,14
12. Wonogiri	680.438,01	724.301,22
13. Karanganyar	1.120.801,61	1.210.158,25
14. Sragen	664.417,68	714.450,59
15. Grobogan	764.375,50	790.129,45
16. Blora	648.590,80	670.708,09
17. Rembang	479.810,80	494.387,59
18. Pati	922.699,70	926.025,86
19. Kudus	3.180.255,97	3.421.058,34
20. Jepara	838.929,70	899.995,94
21. Demak	699.634,38	753.175,81
22. Semarang	856.922,51	981.064,11
23. Temanggung	643.300,02	670.115,93
24. Kendal	1.477.758,34	1.572.394,36
25. Batang	698.098,61	747.105,13
26. Pekalongan	801.600,36	856.440,93
27. Pemalang	937.804,51	1.003.253,35
28. Tegal	829.333,65	883.565,73
29. Brebes	1.104.517,33	1.174.168,12
30. Kod. Magelang	286.445,57	308.667,82
31. Surakarta	1.258.960,51	1.364.001,32
32. Salatiga	220.608,80	236.183,35
33. Semarang	4.682.001,84	5.279.973,86
34. Pekalongan	379.545,33	406.568,10
35. Tegal	312.650,11	338.566,28

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 1998

5.2. Perkembangan Sumbangan Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan cita – cita yang terkandung dalam jiwa Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat adil dan

makmur, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produksi pertanian sebagai bahan baku primer industri.

Untuk menunjang perekonomian dan pertumbuhan ekonomi regional, pembangunan pertanian dapat berperan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menghasilkan produk yang bermutu, memiliki daya saing tinggi, memenuhi kebutuhan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mampu melanjutkan proses industri. Di samping itu, pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat, khususnya para petani, nelayan dan masyarakat pedesaan.

Peranan sektor pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih cukup besar, berdasarkan harga konstan tahun 1993 sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah selama tahun 1993 - 1997 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Pertumbuhan Sektor Pertanian di Jawa Tengah Selama Tahun 1992 -1996 atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rupiah)

Tahun	Nilai Produk Pertanian	Pertumbuhan (%)
1993	7.810.639,73	-
1994	7.782.116,47	-0,37
1995	8.211.174,14	5,51
1996	8.487.971,93	3,37
1997	8.216.026,20	-0,03

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 1998

Sektor pertanian merupakan sektor usaha yang sangat besar ketergantungannya terhadap alam, apabila mengamati data pada tabel diatas ternyata pertumbuhannya selalu tidak stabil. Ada kalanya mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi pada suatu saat bisa terjadi penurunan yang sangat rendah seperti pada

tahun 1994 pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan yaitu sebesar -0,37 persen, dan pada tahun 1997 juga mengalami pertumbuhan yang menurun sebesar -0,03 persen. Hal ini diakibatkan oleh adanya kemarau yang berkepanjangan dan berbagai hama penyakit yang menyerang tanaman padi di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Dengan demikian apabila dalam Repelita VI Jawa Tengah merencanakan laju pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,55 persen pertahun akan sulit untuk bisa terealisasikan.

Pembangunan bidang ekonomi pada pembangunan jangka panjang tahap pertama khususnya pada sektor pertanian telah menghasilkan banyak kemajuan, peranan pertanian tanaman pangan dan hortikultura bagi pembangunan ekonomi sangat besar, yang tercermin antara lain dengan telah meningkatnya produksi pangan dan kesejahteraan para petani. Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura telah mewujudkan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Produksi sub sektor tanaman pangan selama tahun 1993 - 1997 berdasarkan harga konstan 1993 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4
Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan di Jawa Tengah
Selama Tahun 1993 - 1999 Atas Dasar harga Konstan 1993 (Juta Rupiah)

Tahun	Nilai Produk Tanaman Pangan	Pertumbuhan (%)
1993	4.992.343,02	-
1994	4.771.918,22	-4,42
1995	5.184.618,29	8,65
1996	5.397.411,94	4,10
1997	5.268.133,55	-0,02

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 1998

Dari data nilai produk pertanian tanaman di Jawa Tengah selama lima tahun(1993 – 1997) diatas, terlihat mengalami fluktuasi (penurunan) pada tahun 1994 dan tahun 1997, hal ini diakibatkan oleh karena musim kemarau yang panjang serta berbagai hama penyakit yang menyerang di berbagai Dati II di Jawa Tengah yang menyebabkan menurunnya produktivitas tanaman pangan khususnya padi, sehingga menurunkan jumlah produksi secara regional di Jawa tengah.

5.3. Perkembangan Sumbangan Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Pembangunan di sektor pertanian selain untuk meningkatkan produksi, juga untuk meningkatkan tingkat kehidupan sosial, tingkat kehidupan para petani di pedesaan dan memperluas lapangan pekerjaan. Dengan upaya yang sungguh – sungguh melalui tahapan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, sektor pertanian telah memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan perekonomian regional. Beberapa komoditi pertanian telah menunjukkan peningkatan yang mengesankan, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan serta kesejahteraan para petani, yang pada gilirannya memberikan sumbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto.

Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB di Jawa Tengah sampai dengan tahun 1997 menunjukkan andil yang cukup besar. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang selalu meningkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas produk – produk dari sektor pertanian, mengingat Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional.

Meskipun secara proporsi sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB di Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang menurun, namun secara absolut tidak demikian halnya, bahkan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah PDRB total berturut – turut pada periode yang sama. Besarnya sumbangan sektor pertanian, terutama karena dukungan yang besar dari sub sektor tanaman pangan khususnya beras. Untuk melihat perkembangan sektor

pertanian baik secara absolut maupun proporsi mulai dari tahun 1993 - 1997 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 5.5
Sumbangan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar
Harga Konstan 1993 dari Tahun 1993 - 1997 (Juta Rupiah)

Tahun	Nilai Produk Pertanian	Prosentase Dalam PDRB
1993	7.810.639,73	22,99
1994	7.782.116,47	22,34
1995	8.211.174,14	22,82
1996	8.487.971,93	21,78
1997	8.216.026,20	19,05

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 1998

Dari data tabel diatas terlihat bahwa secara absolut sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB relatif meningkat setiap tahunnya. Besarnya sumbangan sektor pertanian, terutama karena dukungan yang besar dari sub sektor tanaman pangan khususnya beras. Untuk melihat perkembangan sub sektor tanaman pangan baik secara absolut maupun proporsi mulai dari tahun 1993 - 1997 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 5.6
Sumbangan Sub Sektor Tanaman Terhadap PDRB Atas Dasar
Harga Konstan 1993 dari Tahun 1993 - 1997 (Juta Rupiah)

Tahun	Produksi Tanaman Pangan	Prosentase Dalam PDRB
1993	4.992.343,02	14,69
1994	4.771.918,22	13,13
1995	5.184.618,29	13,29
1996	5.397.411,94	12,89
1997	5.268.133,55	12,51

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 1998

5.4 Perkembangan Nilai Investasi Pemerintah

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan sampai dengan Pelita VI telah memantapkan kerangka pembangunan jangka panjang tahap kedua di sektor pertanian. Sampai dengan tahun keempat (1997) Pelita VI, hasil – hasil yang dicapai sebagai resultante segala upaya pembangunan yang dilaksanakan adalah : pelestarian swasembada beras, pencapaian swasembada jagung dan kedelai, serta pengembangan hortikultura.

Program pemerintah daerah yang telah ditetapkan di Jawa Tengah, sebagaimana dikemukakan dalam Repelita VI Propinsi Jawa Tengah bahwa untuk mencapai sasaran laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 7 % setiap tahunnya, sektor pertanian diharapkan mencapai pertumbuhan 3,55 %. Pertumbuhan sektor pertanian tersebut terdiri dari sub sektor pertanian tanaman pangan sebesar 4,04 %, perkebunan rakyat 1,97 % peternakan 3,04 % dan perikanan 9,59 % (Repelita VI Jawa Tengah).

Untuk mencapai sasaran - sasaran program tersebut diperlukan usaha- usaha dan investasi di daerah yang didasarkan pada berbagai sumber pembiayaan untuk pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan daerah ada berbagai macam, baik yang bersumber dari dalam daerah maupun luar daerah. Sumber pembiayaan dari dalam daerah dapat berupa tabungan pemerintah daerah (tercermin pada anggaran pembangunan daerah), tabungan perusahaan dan tabungan rumah tangga. Disamping itu sumber pembiayaan dari luar daerah berupa anggaran pembangunan negara (proyek sektoral Pelita Nasional), serta bantuan Inpres yaitu alokasi dana APBN yang di salurkan pada berbagai daerah melalui anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) pada masing – masing tingkat pemerintahan. Sumber – sumber dalam negeri lainnya seperti kredit investasi dan investasi swasta dalam negeri berupa penanaman modal asing dan bantuan luar negeri (Rustian Kamaludin, 1983)

Oleh karena tinjauan dalam penelitian ini lebih banyak dikaji dan diarahkan pada pemahaman serta langkah/kebijaksanaan sektoral pemerintah daerah yang diwujudkan dalam investasi pemerintah dalam kaitannya terhadap perkembangan sub

sektor tanaman pangan, dan karena keterbatasan data yang tersedia maka titik berat aspek yang ditinjau adalah sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I. Investasi pemerintah yang terealisasi selama tahun 1993 – 1997 pada sub sektor tanaman pangan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.7
Nilai Investasi Pemerintah Untuk Sub Sektor Tanaman Pangan
di Jawa Tengah Selama Tahun 1993 – 1997

Tahun	Nilai Investasi (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1993	8.851.670	-
1994	8.867.449	100,18
1995	6.691.012	75,46
1996	12.867.573	192,31
1997	13.863.834	107,74

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Tengah

Investasi pemerintah (pembiayaan dari APBN dan APBD TK I) yang ditanamkan pada sub sektor tanaman pangan di Jawa Tengah secara absolut relatif meningkat pada setiap tahunnya, meskipun secara proporsi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 1995 terjadi penurunan yang cukup tajam baik secara absolut maupun proporsi investasi pemerintah (sebesar 24, 54 persen), hal ini karena adanya pengurangan proyek baik yang dibiayai dengan bantuan APBN maupun APBD dibandingkan tahun sebelumnya.

5.5. Hubungan Antara Nilai Investasi Pemerintah Dengan Perkembangan Sub Sektor Tanaman Pangan di Jawa Tengah.

Seperti telah diketahui bahwa berdasarkan teori ekonomi makro, investasi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produksi, dalam sumbangannya terhadap peningkatan dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Investasi

ini bisa dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh pihak swasta. Dalam penelitian ini pembahasan investasi adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat, maupun pemerintah Daerah Tingkat I khususnya di sub sektor tanaman pangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diketahui, keeratan hubungan antara nilai investasi pemerintah dengan nilai produksi sub sektor tanaman pangan. Hal inilah yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam mengetahui hubungan antara investasi dengan perkembangan nilai produksi sub sektor tanaman pangan.

Sebagai bahan perhitungan untuk mengetahui keeratan hubungan antara nilai investasi terhadap perkembangan produksi adalah dengan menggunakan data – data sekunder dari Departemen Pertanian tentang besarnya nilai investasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I di sub sektor tanaman pangan dengan data nilai produksi sub sektor tanaman pangan dalam PDRB selama kurun waktu lima tahun (1993 – 1997).

Keeratan hubungan antara nilai pertanian dengan nilai produksi sub sektor tanaman pangan ini dinyatakan dalam angka koefisien korelasi dengan notasi r , adapun nilai r ini paling kecil adalah -1 dan paling besar +1. Menurut Mubyarto (1976,69) ditentukan sebagai berikut :

- Jika koefisien korelasi (r) bernilai antara 0,70 sampai 1,00 (positif atau negatif) maka diartikan ada hubungan yang kuat (dalam hal ini antara investasi dengan nilai produksi)
- Jika koefisien korelasi (r) bernilai lebih besar dari 0,40 tetapi lebih kecil dari 0,70 (positif atau negatif) maka diartikan hubungannya kurang kuat.
- Jika koefisien korelasi (r) bernilai lebih dari 0,20 tetapi lebih kecil dari 0,40 (positif atau negatif) maka diartikan hubungannya lemah.

- ⊙ Jika koefisien korelasi (r) bernilai lebih kecil dari 0,20 maka hubungannya dapat diabaikan atau dianggap tidak ada hubungan.

Berdasarkan angka korelasi yang ada maka akan dapat diberikan kategori hubungan / penggolongan, dari hasil penghitungan koefisien korelasi yang dilakukan, apakah akan masuk kategori hubungan yang kuat atau yang lemah atau tidak ada hubungannya. Perhitungan angka koefisien korelasi antara nilai investasi pemerintah di sub sektor tanaman pangan dengan nilai produk tanaman pangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8

Perhitungan Koefisien Korelasi Antara Nilai Investasi Pemerintah Dengan Nilai Produk Sub Sektor Tanaman Pangan (Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai Investasi Pemerintah (x)	Nilai Produk Tanaman Pangan (Y)	$X - \bar{X}$ (X i)	$Y - \bar{Y}$ (Y i)	$(X i)^2$	$(Y i)^2$	$X i . Y i$
1993	8.851,670	4.992.343,02	- 1.376,638	- 130.541,98	1.895.132,18	17.041.208.542	179.709.050,26
1994	8.867,449	4.771.918,22	- 1.360,859	- 350.966,78	1.851.937,22	123.177.680.663	477.616.301,66
1995	6.691,012	5.184.618,29	- 3.537,296	61.733,29	12.512.462,99	3.810.999.094	218.368.919,81
1996	12.867,573	5.397.411,94	2.639,265	274.526,94	6.965.719,74	75.365.040.785	724.549.344,32
1997	13.863,834	5.268.133,55	3.635,526	145.248,55	13.217.049,29	21.097.141.277	518.054.879,94
Jumlah	51.141,538	25.614.425,02			36.442.301,42	240.492.070.361	2.128.298.495,6

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah

Di bawah ini disajikan cara menghitung koefisien korelasi antara nilai investasi pemerintah dengan nilai produk tanaman pangan di Jawa Tengah. Dengan melihat data pada tabel 5.8 dapat dicari nilai rata – rata investasi pemerintah per tahun (\bar{X}) :

$$\bar{X} = \frac{51.141.538}{5} = 10.228,308$$

Kemudian dicari rata- rata nilai produk sub sektor tanaman pangan pertahun (\bar{Y}) :

$$\bar{Y} = \frac{25.614.425,02}{5} = 5.122.885$$

Dari data yang terdapat pada tabel 5.8 dapat dicari nilai koefisien korelasi (r) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{2.128.298.495,61}{\sqrt{36.442.301,42} \sqrt{240.492.070.361}}$$

$$= \frac{2.128.298.495,61}{2.960.421.656}$$

$$r = 0,7198$$

Dari hasil perhitungan, ternyata diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,7198 dibulatkan menjadi 0,72 dengan tanda positif. Nilai koefisien tersebut diatas signifikan atau tidak, perlu dilakukan pengujian dengan uji - t, dengan tingkat kepercayaan sebesar 90 % atau dengan $\alpha = 10 \%$. Langkah pengujian adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 t - \text{hitung} &= \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}} \\
 &= \frac{0,7198 \sqrt{5 - 2}}{\sqrt{1 - (0,7198)^2}} \\
 &= \frac{1,246}{0,69} \\
 &= 1,81
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui apakah t - hitung ditolak atau diterima perlu dilihat dulu nilai dari t - tabel pada $df = 3$ (yaitu $n - 2$ atau $5 - 2 = 3$) dan $\alpha = 10 \%$ diperoleh nilai 1,64. Kemudian dibandingkan dengan nilai t - hitung yaitu 1,81 ternyata t - hitung lebih besar daripada t- tabel.

Dari hasil pengujian diatas terlihat bahwa adanya signifikansi (pada $df = 3$ dan $\alpha = 10 \%$) dalam penelitian ini antara teori yang menyatakan bahwa investasi yang meningkat akan berpengaruh positif pada peningkatan output, yang berarti bahwa dengan meningkatnya investasi di sektor pertanian pada umumnya dan

khususnya di sub sektor tanaman pangan merupakan salah satu faktor meningkatnya produk sub sektor tanaman pangan. Hal ini terlihat pada data nilai produk tanaman pangan yang secara absolut meningkat meskipun mengalami fluktuasi naik dan menurun (tahun 1994 dan 1997 mengalami penurunan), karena sifat dari produk/hasil dari sektor pertanian pada umumnya banyak dipengaruhi oleh faktor – faktor eksternal (alam dan iklim) yang sulit untuk diantisipasi dan diprediksi sebelumnya oleh kemampuan manusia seperti banjir, hama penyakit, kemarau panjang dan sebagainya.

Hasil tersebut mengandung arti bahwa dengan meningkatnya investasi dari pemerintah mempunyai dampak atau pengaruh yang cukup kuat pada perkembangan produk sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya sumbangan produk sub sektor tanaman pangan secara absolut terhadap PDRB di Jawa Tengah. Jadi Kebijakan sektoral pemerintah dalam sektor pertanian melalui investasi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan sektor pertanian di Jawa Tengah. Hal ini perlu diikuti oleh kalangan swasta supaya lebih aktif menangkap peluang bisnis pada sektor pertanian di Jawa Tengah, karena selama ini sektor pertanian masih terkesan “ di anak tirikan “ oleh pengusaha swasta dibandingkan dengan sektor industri.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bagian – bagian sebelumnya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

- Sampai dengan tahun keempat Pelita VI berdasarkan atas harga konstan tahun 1993 Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah secara absolut terus mengalami peningkatan. Hasil – hasil pembangunan tiap Pelita tercermin antara lain pada perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Sumbangan tiap sektor pada PDRB mengalami perkembangan dan perubahan, sampai dengan tahun keempat Pelita VI distribusi prosentase terhadap PDRB tertinggi berturut – turut dicapai oleh sektor industri yaitu sebesar 31,79 persen diikuti sektor perdagangan hotel dan restoran dengan memberikan sumbangan yang berarti bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 22,29 persen. Sektor berikutnya yaitu pertanian memberikan andil sebesar 19,05 persen.
- Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB dengan harga konstan tahun 1993 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 3,03 persen (1996 = 7,30 persen). Hal ini cukup beralasan mengingat perjalanan perekonomian selama tahun 1997 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaruh musim kemarau yang berkepanjangan hingga akhir tahun 1997 yang berpengaruh terhadap produksi pertanian disertai krisis ekonomi dan moneter terhadap sektor konstruksi, industri dan perdagangan.

- Peranan sektor pertanian masih cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah karena mampu memberikan andil sebesar 19,05 persen. Besarnya sumbangan sektor pertanian tersebut karena dukungan yang besar dari sub sektor tanaman pangan khususnya beras, yang secara absolut meningkat dari tahun ke tahun.
- Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah di perlukan dana pembangunan, baik dari pemerintah, swasta maupun swadaya dari masyarakat. Dari data investasi pemerintah pada sub sektor tanaman pangan selama tahun 1993 - 1997 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri masih jauh dari memadai, sehingga sumber dari Pemerintah Pusat melalui APBN masih tetap memegang peranan utama.
- Berdasarkan perhitungan dan analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar **0,7198** dengan tanda positif, dengan hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara investasi pemerintah di sub sektor pertanian tanaman pangan dengan produk tanaman pangan di Jawa Tengah. Jadi kebijakan investasi pemerintah pada sub sektor tanaman pangan yang diwujudkan dalam pembiayaan melalui APBN, APBD maupun pendanaan lainnya di Jawa Tengah di sub sektor ini merupakan salah satu faktor yang mendorong perkembangan produk tanaman pangan di Jawa Tengah.

6.2. Saran Pengembangan

- Nilai produk sektor pertanian khususnya tanaman pangan di Jawa Tengah yang secara absolut cukup besar dalam sumbangannya terhadap PDRB perlu terus di pertahankan dan ditingkatkan, mengingat Jawa Tengah merupakan daerah penyangga pangan nasional dan sektor pertanian masih

merupakan penyumbang terbesar dalam penyediaan lapangan kerja di Jawa Tengah.

- Usaha – usaha peningkatan produksi pertanian melalui : intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi di segala bidang pertanian harus semakin dioptimalkan. Penyempurnaan kegiatan penyuluhan, penelitian dan pemilihan teknologi tepat guna lebih ditingkatkan untuk disebarluaskan kepada seluruh masyarakat tani sebagai pendukung laju kegiatan pembangunan khususnya sektor pertanian.
- Peran pemerintah perlu ditingkatkan melalui kebijakan di bidang penanaman modal di sektor pertanian supaya perekonomian sektoral dan regional bisa berkembang dengan baik dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1981. **Teori Pertumbuhan Ekonomi**. Yogyakarta : BPFE Universitas Gadjah Mada.
- BPS Jawa Tengah, 1996. **Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah**. Semarang : Kantor Statistik Jawa Tengah
- BAPPEDA Dati I Jawa Tengah, 1989. **Evaluasi Pelita VI Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah**. Semarang : Bappeda Dati I Prop. Jawa Tengah.
- Dayan, Anto, 1984. **Metode Pengantar Statistik**. Jakarta : LP3 ES.
- Djojohadikusumo, Soemitro, 1960. **Ekonomi Pembangunan**. Jakarta : PT. Pembangunan
- Djojohadikusumo, Soemitro, 1980. **Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang**. Jakarta : LP3 ES.
- Kamaludin, Rustian, 1983. **Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah**. Jakarta : Galia Indonesia.
- Mubyarto, 1976. **Metodologi Penelitian Ekonomi**. Yogyakarta : BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Sukirno, Sadono, 1995. **Pengantar Teori Makro Ekonomi**. Jakarta : LPFE Universitas Indonesia.
- Sukirno, Sadono, 1995. **Ekonomi Pembangunan. Proses Masalah dan Dasar Kebijaksanaan**. Jakarta : LPFE Universitas Indonesia.
- Samuelson, 1990. **Teori Ekonomi**. Terjemahan Paul Sitohang. Kerjasama Penerbit Bharata Jakarta dan Penerbit Yayasan Kanisius Yogyakarta.
- Reksohadiprojo, Sudiono, 1990. **Ekonomi Makro : Pengantar Analisa Pendapatan Nasional**. Yogyakarta : Liberty.
- Sumantoro, 1992. **Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal**. Jakarta : Bina Cipta.

- **Jawa Tengah Dalam Angka, 1996.** Kantor Statistik BPS
Propinsi Jawa Tengah
- **Jawa Tengah Dalam Angka, 1997.** Kantor Statistik BPS
Propinsi Jawa Tengah
- **Jawa Tengah Dalam Angka, 1998.** Kantor Statistik BPS
Propinsi Jawa Tengah
- **GBHN (TAP MPR No. II / MPR / 1988).** Bahan Referensi
Penataran P4. Pola 100 Jam di Perguruan Tinggi bagi
Mahasiswa baru Tahun ajaran 1988 / 1989.
- **Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Tingkat
I Propinsi Jawa Tengah**

Suara Merdeka, 1998. Tanggal 10 Juni 1998